

**PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
TERHADAP KUALITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS DESA BAROWA KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU)**

*INFLUENCE OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS
ON THE QUALITY OF MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS
(CASE STUDY OF BAROWA VILLAGE, BUA DISTRICT, LUWU DISTRICT)*

MUSDALIFA, A. DAHRI ADI PATRA LS, HAPID

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palopo

Palopo – 085255774966
E-mail : ippamusdalifa20@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of accounting information systems on the quality of village financial management in improving the quality of village finances in Barowa Village, Bua District, Luwu Regency. The methods used in this research are field observation, interviews, justification and documentation. Based on the results of this study, the accounting information system in financial management has been effective and has an influence on the preparation of financial reports, this can be seen from the quality of the resulting financial reports and it is recognized by the inspection team from the region.

Keywords: Accounting Information System, Quality, Reports, and Village Financial Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan kualitas keuangan desa di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, wawancara, justifikasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan sudah efektif dan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan, hal ini terlihat dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan diakui oleh tim pemeriksa dari wilayah.

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas, Laporan, dan Pengelolaan Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Mengatur bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai

dengan uang, serta nilai uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selain itu, keuangan desa harus dikelola sesuai prinsip transparan, akuntabel, dan inklusif serta dilaksanakan dengan anggaran yang terkendali dan disiplin. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 113 tentang Petunjuk Pengelolaan Ekonomi Desa, yang merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola ekonomi desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan berbagai desa. sumber daya manajemen keuangan. (Pemerintah RI, 2014).

Pundi-pundi desa, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes), adalah rencana keuangan tahunan yang terpisah dan disetujui oleh dewan desa dan badan pertimbangan dan diatur dengan “peraturan desa”. Dalam setahun, APBdes terdiri dari aliran pendapatan dan alokasi untuk belanja desa. Pengelolaan keuangan publik sangat penting dan harus diatur secara ketat sesuai dengan kebijakan pemerintah. Menurut pasal 2 ayat 1 Pemdagri I nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparan, bertanggung jawab, partisipatif dan dilaksanakan secara tertip dan disiplin anggaran. Pemerintah desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tentang pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan pada tahun 2018. Keuangan desa dikelola dengan prinsip transparan, bertanggung jawab, dan inklusif serta dikelola dengan anggaran dan disiplin untuk menghindari risiko. penyimpangan, penipuan dan korupsi. Administrasi keuangan kota meliputi perencanaan keuangan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban seluruh kota.

Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu penyedia informasi khususnya informasi keuangan yang sangat dibutuhkan oleh calon pelanggan. Beberapa pihak yang menggunakan informasi keuangan adalah pihak eksternal dan internal. Pengelolaan dana desa rawan manipulasi, sehingga pemerintah mempertimbangkan penggunaan sistem keuangan desa untuk pengelolaan dana desa. Penggunaan dana desa oleh pemerintah didasarkan pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Desa diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri, membiayai dan melaksanakan pekerjaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Aplikasi pengelolaan dana desa yang dikembangkan oleh BPKP (Badan Ekonomi dan Pembangunan) adalah Siskuedes yang dikembangkan sejak tahun 2015. Saat ini pemerintahan desa telah diserahkan kepada desa itu sendiri untuk kepentingan masyarakat, pemerintah telah menyiapkan petunjuk atau pedoman pelaksanaan dan pengendalian pemerintahan desa dengan laporan dan informasi setiap saat dilaporkan oleh otoritas terkait. di desa. . Mulai sekarang, peneliti ingin menyelidiki penerapan sistem “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas

Pengelolaan Keuangan Desa” studi pada Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem adalah suatu alat yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengelola suatu layanan tertentu. Sistem masing-masing merupakan prasyarat bagaimana perusahaan dapat berfungsi dengan baik. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem adalah kerangka acuan yang diatur menurut rencana induk dan prosedur terkait untuk menjalankan fungsi atau kegiatan utama perusahaan. . (Mulyadi, 2001:3) Sistem adalah jaringan prosedur yang bagian-bagiannya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga fase input, proses, dan output. Suatu sistem juga merupakan suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang terletak pada suatu daerah dan mempunyai unsur-unsur pengendalian, misalnya kesamaan. Negara adalah kumpulan dari beberapa unsur pemersatu lainnya karena provinsi-provinsi bergabung bersama untuk membentuk negara di mana rakyat negara itu bertindak sebagai penggerak. Sistem informasi akuntansi adalah komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang signifikan dan pengambilan keputusan kepada pihak luar dan pihak luar. Akuntansi itu sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Fitur Sistem Informasi Akuntansi membedakannya dari subsistem CBIS lainnya :

- a. Sistem Informasi Akuntansi melakukan tugas-tugas yang diperlukan
- b. Ikuti prosedur yang cukup standar
- c. Proses informasi rinci
- d. Berfokus secara historis
- e. Menawarkan informasi spesifik sesedikit mungkin (Al midjan dan susanto, 2010).

Fungsi penting yang dibentuk sistem informasi akuntansi dalam organisasi adalah:

- a. Mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang aktivitas dan transaksi.
- b. Memperlakukan informasi sebagai informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Kontrol ketat atas aset organisasi.

Kualitas pelaporan keuangan dan berbagai metriknya sering digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi, dan persyaratan kredit. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan standar akuntansi negara. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Jayanti, 2012). Prinsipnya terdiri dari dasar perhitungan, nilai historis, realisasi, isi atas bentuk formal, kontinuitas, konsistensi. (Mahartini et al., 2021). Kualitas laporan keuangan daerah yang baik

juga dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern (SPI). Sistem Pengendalian Intern (SPI) memberikan kepercayaan terhadap efektivitas dan efisiensi proses akuntansi, terutama dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan demikian, penerapan sistem pengendalian internal dapat meningkatkan keandalan dan objektivitas informasi serta memudahkan penelaahan atas laporan keuangan. Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah desa juga ditentukan oleh pengendalian intern yang baik. Ketika pengendalian internal lemah, menjadi sulit untuk mendeteksi kecurangan dalam proses akuntansi dan sertifikat audit yang diperoleh dari informasi akuntansi menjadi tidak berarti. (Herawati, 2014). Pasal 71 PP No. 2010 tentang kerangka konseptual akuntansi negara menyebutkan bahwa ciri kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus diambil dalam informasi akuntansi agar mencapai tujuannya. Empat karakteristik berikut merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan negara mencapai kualitas yang diinginkan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa merupakan suatu kesatuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

1. Perencanaan Pemerintah desa mengacu pada rencana pembangunan desa dan menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Mengembangkan rencana pembangunan desa untuk memastikan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Sujarweni, 2015). Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan lokasi, dimana para pelaku berada, atau pelaksanaan pemerintahan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut (Indrianasari, 2017).

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran desa yang telah ditetapkan sebelumnya akan menghasilkan transaksi Pendapatan dan pengeluaran desa. Semua pendapatan dan pengeluaran desa ditangani melalui rekening kas desa. Bagi yang belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya, kesatuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah/Pemkot membuat peraturannya. Pendapatan dan pengeluaran Desa harus mendukung bukti yang lengkap dan efektif (Sujarwani 2015).

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang terutama dilakukan oleh bendahara. Proses penatausahaan pengelolaan dana desa, kepala desa harus menetapkan bendahara desa sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan.

Bendahara desa atau pengawas keuangan desa merupakan perangkat desa yang dalam rangka pelaksanaan APBdes didukung oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, mengelola, memayar, dan bertanggung jawab atas dan desa (Andriani dan Zulaika, 2019).

4. Pelaporan

Menurut Pemandagri Nomor 113 Tahun 2014, kepala deas harus menjalankan wewenang, hak dan kewajiban, sebagai berikut:

- a. Menyampaikan laporan realisasi APBdes kepada Bupati/walikota dalam bentuk laporan semester. Laporan dikirim sampai akhir Juli tahun berjalan, laporan tahunan pada akhir tahun.
- b. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Lembaga Desa (LPPD) kepada penyelenggara negara/walikota setiap akhir tahun anggaran. Menyampaikan Laporan Pengurus Lembaga Desa (LPPD) kepada Direktur Negara/Walikota di akhir masa jabatan.
- c. Setiap akhir tahun anggaran, menyampaikan pernyataan tertulis penyelenggaraan pemerintah desa kepada BPD.
- d. Pertanggungjawaban

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenis datanya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Mengenai pengertian penelitian kualitatif, secara khusus penelitian bertujuan untuk mengamati fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara komprehensif, dengan deskripsi verbal dan linguistik, dalam konteks alamiah tertentu dan menggunakan metode ilmiah yang berbeda (Moleong, 2006). Jenis metode penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menggambarkan bagaimana memecahkan masalah saat ini berdasarkan data yang ada dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan aparat pemerintah Desa dan Masyarakat.

JENIS DATA

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yaitu subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak aparat pemerintah Desa dan Masyarakat.

Data Sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder

dalam penelitian ini berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun oleh aparat Desa atau Bendahara Desa dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan.

INFORMASI PENELITIAN

Adapun yang terpilih sebagai informan penelitian ini terdiri dari unsure pemerintah desa dan dari unsur masyarakat, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 12 (Dua Belas) orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Kepala Desa
2. Sekertaris Desa
3. Bendahara Desa
4. Kaur Pembangunan
5. Ketua BPD
6. 2 Kepala Dusun
7. 5 Orang Anggota Masyarakat

LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten luwu. Adapun penetapan lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa pemerintah Desa telah menggunakan Sistem Informasi Akuntansi.

METODE PENGUMPULAN DATA

Untuk mendapatkan data akurat yang konsisten dengan data yang diperlukan untuk penelitian ini, teknik pengumpulan data berikut digunakan:

1. Metode observasi

Metode observasi yang dimaksud observasi dalam penelitian ini adalah pengantara langsung dengan melihat, mengamati sendiri kejadian dilapangan Metode interview (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menerima informasi dari responden melalui tatap muka, dialog tatap muka. Wawancara atau wawancara adalah suatu proses pengumpulan informasi untuk kepentingan penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dengan responden/terwawancara, dengan atau tanpa bantuan fasilitator wawancara

1. Metode Jastifikasi

Menurut M. Ansjar, dkk, justifikasi adalah proses pembuktian suatu pertanyaan berdasarkan definisi, teorema, dan lemma yang telah dibuktikan sebelumnya. Sederhananya, membenaran adalah bukti serta pertanggungjawaban yang masuk akal atas apa yang diyakini benar.

Rasional dapat dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama. Pembeneran teoritis, yaitu pembuktian teori dari teori-teori yang sudah ada pada penelitian sebelumnya atau dari para ahli tertentu.
2. Bukti faktual adalah bukti faktual berdasarkan pengalaman kerja langsung, literatur, dan penelitian lainnya.
4. Metode Dokumentasi
Artinya, penulis menggunakan literatur yang ada di bidang kajian untuk mendukung dan melengkapi bukti-bukti dari sumber lain yang relevan dengan penelitian. Contoh dokumen yang digunakan adalah data berupa artikel, foto, handphone, dll.

METODE ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama dan setelah pengumpulan data dengan teknik analisis tematik (subyek penelitian). Komponen analisis data dari model interaksi dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi data Reduksi data memusatkan perhatian, menyeleksi data dan menyederhanakan data, reduksi data adalah kegiatan menjumlahkan faktor-faktor kunci, memusatkan perhatian memusatkan perhatian pada faktor-faktor penting, sehingga data yang dipadatkan dapat memberikan gambaran yang jelas, akan memudahkan peneliti dalam melakukan tugas pengumpulan data lainnya dan membantu peneliti Lebih mudah menemukannya saat Anda membutuhkannya kapan saja. Reduksi data akan terus berlangsung dan efektif selama penelitian dilakukan.
2. Penyajian data (data display) Tujuan penyajian data adalah memudahkan pencari untuk melihat semua atau sebagian dari hasil mempelajari.
3. Verifikasi Data Verifikasi merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Keabsahan data diperiksa melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan objektivitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Siskeudes adalah suatu aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memudahkan pemerintah desa dalam pengelolaan laporan keuangan desa di Desa Barowa, kemendagri bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengembangkan aplikasi komputer sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang tepat dan andal. Melalui aplikasi ini desa mendapatkan kemudahan dalam mengelola laporan keuangan desa. Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) awalnya untuk menindaklanjuti UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebelum adanya aplikasi Siskeudes ini, pengelolaan keuangan di Desa dilakukan secara manual mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Semua prosesnya hanya mengendalikan software Microsof Word dan Microsoft

Excel, Penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Barowa efektif pada tahun 2015 karena pada saat awal peluncuran aplikasi Siskeudes, Desa Barowa sudah memiliki persiapan, adanya perangkat elektronik yang bisa mengakomodir sistem dan ada sumber daya manusia sebagai operator aplikasi Siskeudes. Tetapi operator aplikasi belum mengerti tentang tata cara pengoperasian aplikasi Siskeudes sehingga perlu mengikuti bimtek terlebih dahulu dari program pemerintah daerah.

Proses Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan di desa dimulai dari RPJMDes karena RPJMDes berlaku selama enam (6) tahun, karena sekatan dari RPJMDes itu Rencana Kerja Pemerintah Desa Jangka Panjang setelah pemilihan kepala desa dilaksanakan dan di bentuk tim, dan telah pembentukan tim dan mengkoordinasikan dengan kepala desa untuk program selama enam (6) tahun kedepan selama masa jabatan dan apa saja yang menjadi program dimasa jabatannya selama enam (6) tahun itu, setelah RPJMDesnya rampung baru setiap tahunnya itu dibuat lagi RKPDes yang mengacu dari RPJMDes jadi semua program RKP setiap tahunnya, pembuatan RKPDes terlebih dahulu melihat dokumen RPJMDes.

Proses perencanaan dalam Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dilakukan satu kali setelah transaksi yang ada dan dapat dipublikasikan dalam bentuk file manajemen dan laporan sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang. Selama proses pelaksanaan, desa harus menentukan RAB (rencana Anggaran Biaya) yang telah diatur sebelumnya untuk informasi di sistem sebelum memasukkan data ke dalam aplikasi Siskeudes.

Kualitas Laporan Keuangan Desa

Kualitas laporan ekonomi desa adalah bahwa pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta pengelolaan dan penganggaran (Dewi, Rusika Marta dan Ratih, 2018). Oleh karena itu, sudah seyakinya laporan keuangan desa disusun dan dipatuhi berdasarkan prinsip-prinsip di atas, sehingga laporan keuangan desa lebih berkualitas dan memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Laporan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa meliputi: Anggaran, Buku Kas, Buku Pajak, Buku Bank, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sedangkan pihak- pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya: masyarakat desa, Perangkat desa, Pemerintahan daerah, dan pemerintahan pusat. Laporan keuangan di katakana berkualitas jika tidak adaper masalah seperti fenomena tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatannya pemerintah desa harus membangun dan memiliki sistem pengendalian internal yang baik, akibatnya sering terjadinya berbagai kasus yang ada seperti: korupsi, penyelewengan keuangan desa, pemborosaan anggaran dan

kualitas laporan keuangan pemerintah desa yang buruk Efektivitas Pengolaan Dana Desa Ditinjau Dari Kualitas Pelaporan Keuangan Desa di Desa Barowa. penggunaan aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan sangatlah membantu bagi pemerintah desa dan lebih mempermudah dalam pengimputan dan laporan keuangan di desa lebih transparansi karena masyarakat memantau pengelolaan keuangan yang ada di desa seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa kalau proses pengelolaan keuangan itu dipantau oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan, dan terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh pemerintah desa sehingga laporan keuangan Desa Barowa mendapatkan nilai baik dari daerah dan meningkatkan profesional desa dalam membuat laporan keuangan.

SIMPULAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah desa di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil laporan keuangan yang dihasilkan baik dan meminimalkan pemerintah desa untuk berbuat yang tidak sesuai fungsi dan tanggungjawabnya. Yang berarti dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi, maka kualitas laporan keuangan pemerintah Desa yang disajikan akan lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- A. Arianto, A. K. (2020). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). 2, 183–194.
- Arikunto, 1993. *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, Jakarta ; Rhineka Cipta.
- Azhar, Susanto. 2010. *Sistem Informasi Edisi 5*. Bandung: Lingga Jaya.
- Abdurrohman, H. (2019). Pengaruh Kompetensi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa). *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(2). <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.306>.

[https://www.google.com search client firefox bd&q penjelasan mengenai laporan keuangan desa](https://www.google.com/search/client/firefox/bd&q=penjelasan+mengenai+laporan+keuangan+desa)

Eka Sarastini, Ni Putu dan Sadha Suardikha, I. M. (2017). Pengaruh Pelatihan Dan Pendidikan, Dukungan Manajemen Puncak Dan Kemampuan Teknik Pemakai Sia Pada Kinerja Individual. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v20.i02.p22>

Gayatri, Made Yenni Latrini (2018) Efektivitas penerapan siskeudes dan kualitas laporaKeuangan dana desa *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, Juli 2018

Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, 1(2), 29-46. Online. <https://doi.org/10.1079/BJNI19860067> (Diunduh pada tanggal 26 januari 2023)

Lexi J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya

Nurcholis, C., & Rachman, A. S. (2011). Kinerja Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran Daerah Kasus Kota Depok. *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta*. (Diunduh pada tanggal 26 Januari 2023)

Pemerintah RI. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. *Lincoln arsyad*. (Online). <https://doi.org/http://dx.doi.org/110.21043/equilibrium.v3i2.1268> (Diunduh pada tanggal 26 Januari 2023)

Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.770>.

Ritonga, Fauzi M. A. (2022). *Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban*.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-Undang no 6 Tahun 2014, (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

